IMPLEMENTASI KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Cristanti Laurenia
NPP. 29.1060
Asdaf Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: Cristantilaurenia25@gmial.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the coordination between BPBD and the Environment Agency as the agency that handles forest and land fire prevention in Palangka Raya City, which annually experiences forest and land fires. **Purpose:** The purpose of this study is to collect data and analyze so that the final result can be obtained an overview of the implementation of coordination between the Regional Disaster Management Agency and the Environment Agency in preventing forest and land fires in Palangka Raya City. **Method:** The design used in this study is a research design. qualitative method with descriptive method using Edward III's theory of implementation. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (4 informants) and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that the implementation of coordination between BPBD and the Environmental Service is running quite well, but not yet optimal because there is no form of work program in which these two agencies work together so that the existing activities tend to run individually. **Conclusion:** From the results of this study, it can be concluded that the coordination between BPBD and the Department of the Environment is going well, although not yet optimal, so that land forest fires in Palangka Raya City still occur.
Keywords: Coordination, Prevention, Forest, and Land Fires.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis fokus pada jalannya koordinasi BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang menangani pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya yang setiap tahunnya mengalami kebakaran hutan dan lahan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan menganalisis sehingga pada hasil akhir dapat diperoleh gambaran implementasi koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya **Metode:** Desain yang digunakan dalam penelitian ini ialah desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan teori implementasi milik Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (4 informan) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi koordinasi antara BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup berjalan cukup baik, nemun belum optimal disebabkab belum adanya bentuk program kerja dimana kedua instansi ini bekerja sama sehingga kegiatan yang ada cenderung berjalan masing-masing **Kesimpulan:** Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi

BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup berjalan dengan baik meski belum optimal sehingga kebakaran hutan lahan di Kota Palangka Raya masih terjadi.

Kata kunci: Koordinasi, Pencegahan, Kebakaran Hutan dan Lahan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2007 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana yang terjadi. UU No 24 tahun 2007 kemudian menjadi dasar hukum yang bertujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin adanya penanggulangan bencana secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi sekaligus dasar hukum pembentukan BPBN yang tertera pada pasal 10. Indonesia adalah negara dengan sistem desentralisasi sehingga pada pasal 18, diamanatkan daerah berhak membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri untuk mengatasi bencana di daerah masing-masing. UU Nomor 24 Tahun 2007 menetapkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Nasional maupun Daerah memiliki peran dan wewenang untuk menjalankan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Kegiatan penanggulangan bencana untuk mengoptimalkan hasil, tidak bekerja sendiri melainkan dilaksanakan oleh banyak lembaga pemerintahan, sehingga Badan Penanggulangan Bencana sebagai lembaga yang membidangi penanganan kebencanaan mengkoordinasikan kegiatan upaya penanggulangan yang dilakukan.

Kota Palangka Raya adalah kota yang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang berdasarkan Good News From Indonesia (2020) merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan wilayah hutan terluas dengan luas sekitar 15.300.000 hektare atau 153.000 km^2, namun juga di ketahui sebagai Provinsi dengan kasus kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Palangka Raya selain disebabkan oleh faktor alam juga didukung oleh sikap masyarakat Kota Palangka Raya yang sengaja membakar hutan untuk kepentingan pembukaan lahan yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan sawit dan usaha perkebunan di tengah musim kemarau. Pembakaran hutan demi kepentingan membuka lahan sangat berbahaya apabila dilakukan di daerah rawa/gambut yang secara harafiah banyak di temukan di wilayah Kota Palangka Raya yang apabila dilakukan pembakaran hutan demi membuka lahan dengan skala besar akan menyebabkan pembakaran yang sulit terkendali disebabkan tanah di daerah tersebut merupakan tanah gambut yang menyebabkan sulitnya api dipadamkan dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem.

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya saat ini sering kali hanya berfokus pada fase tanggap darurat dan mengabaikan fase pra-bencana dan pasca-bencana yang menyebabkan masih belum optimalnya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Palangka Raya. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tentu merugikan banyak pihak baik secara ekonomi, ekologi, sosial dan budaya bahkan politik. kebakaran hutan merusak ekosistem dan habitat mahkluk hidup yang hidup di hutan bahkan dampak dari kebakaran hutan juga merusak lingkungan hidup karena asap yang ditimbulkan dari hasil pembakaran hutan dapat menimbulkan polusi udara dan air yang berdampak bagi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan asas desentralisasi yang dianut oleh Indonesia dan di dasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat (1) yang menetapkan urusan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah, di mana salah satunya adalah

urusan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2004, daerah berhak untuk mengatur lingkungan hidupnya sendiri, dalam hal ini adalah menangani kebakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan hidup. Dalam penanggulangan hutan dan lahan pencegahan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam fase pra-bencana. Dalam pelaksanaan pencegahan, tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi, koordinasi dan kerja sama sangat dibutuhkan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemenuhan sarana dan prasarana serta sumber daya sangat dibutuhkan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota palangka Raya mengingat dalam susunan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdapat bidang yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2019 terdapat bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang bertugas untuk memantau dan mengawasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi agar tidak meluas hingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Berdasarkan fungsi koordinasi BPBD dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, maka kedua lembaga berkoordinasi bersama dalam rapat koordinasi yang di adakan setiap tahun oleh pemerintah daerah kota Palangka Raya namun pada implementasi koordinasi sebagai hasil dari rapat koordinasi, kedua lembaga di lapangan terkesan membuat program yang berjalan masing-masing sedangkan tujuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum berjalan optimal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dibalik pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses koordinasi kedua instansi ini. Masih belum diberikannya izin ataupun surat perintah dari Walikota Palangka Raya sebagai kepala Satgas Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Kota Palangka Raya sehingga koordinasi yang dijalankan oleh kedua instansi ini hanya sebatas komunikasi dan kerja sama, tidak melalui suatu kegiatan integrasi yang berlandaskan SK.

Selanjutnya adalah Sumber daya, dalam hal ini pelaksanaan koordinasi kedua isntansi juga belum optimal karena kekuranganya sumber daya, baik Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidang masing-masing sehingga dalam kegiatan pencegahan dilapangan belum berjalan optimal selain itu kurangnya sumber daya sarana dan prasarannya dari kedua instansi juga cukup menyulitkan sebab saat akan dilaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan kebanyakan akses menuju lokasi tempat rawan kebakaran hutan dan lahan cukup sulit untuk dijangkau dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengimplementasian kebijakan maupun konteks kegiatan koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian Kunto Arief Wibowo yang berjudul Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan menemukan penanganan karhutla hanya bergerak pada situasi tanggap darurat dan mengabaikan pra dan pasca-bencana sehingga karhutla di Indonesia tidak teratasi dengan baik yang berimbas buruk pada berbagai aspek berbangsa dan bernegara seperti ekonomi, sosial hingga politik (Wibowo,2019). Penelitian Aldi Dhafri yang berjudul Penerapaan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau menemukan Penerapan Koordinasi BPBD & Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Provinsi Riau belum berjalan optimal di lihat dari data di lapangan bahwa masih banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan. Dalam penerapan koordinasi terdapat beberapa faktor hambatan seperti, kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya alokasi dana, dan kesadaran masyarakat yang kurang tentang dampak dari kebakaran hutan dan lahan (Dhafri, 2021). Yang terakhir ialah penelitian Sitie Nurfatiehah yang berjudul Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Gowa, yang menemukan bahwa Pembagian tugas koordinasi antara BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Gowa belum maksimal dan masing-masing SKPD dalam mitigasi bencana banjir berjalan sendiri-sendiri sehingga pelaksanaan mitigasi banjir di Kabupaten Gowa belum optimal (Nurfatiehah,2019)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada jalannya Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Palangka Raya dalam melaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya sehingga berbeda dengan penelitian Wibowo, Dhafri, dan Nurfatiehah sebelumnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Edward III (Agustino,2008) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dilihat dari empat indikator, yaitu komunikasi; sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan jalannya koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti guna mencari fenomena atau fakta yang dikerjakan secara sistematis dengan menggunakan metode, dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk medeskripsikan keadaan atau peristiwa yang ada, baik bersifat alami maupun rekayasa manusia dengan memusatkan perhatian pada keterkaitan kegiatan dan peneliti tidak melakukan tindakan manipulasi dan perubahan data.(Sukmadinata, 2011).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, dan Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi milik Edward III (Agustino, 2008) yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah implementasi dapat diukur dengan empat indikator, yaitu komunikasi; sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan smart city di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengembangan Daerah menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan keberhasilan sebuah implementasi dapat diukur menggunakan 4 dimensi yaitu komunikasi; sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Komunikasi

Penulis melakukan hasil wawancara dan beberapa dokumentasi yang mendukung hasil temuan dimana berdasarkan teori Edward III terhadap dimensi Komunikasi terdapat tiga faktor yang terdiri dari bentuk komunikasi, kejelasan, dan konsistensi.

Faktor bentuk transmisi, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dan Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyatakan bahwa ada bentuk implementasi koordinasi yang berjalan hannyalah melalui kerja sama kedua instansi bukan melalui suatu kegiatan dimana kedua instansi bersinergi melalui program kerja namun komunikasi yang berjalan antara kedua instansi berjalan dengan baik melalui komunikasi formal ataupun informal.

Pada faktor kejelasan terutama untuk petunjuk pelaksanaan kebijakan Implementasi Koordinasi ini belun ada secara resmi dan tertulis yang dikeluarkan sehingga cukup menghambat kedua instansi ini, sehingga koordinasi yang kedua instansi ini jalankan hanya berupa kerja sama dilapangan.

Faktor Konsistensi ialah indikator konsistensi dimana Dalam menjaga konsistensi kebijakan maka diperlukan upaya dari pelaksana kebijakan, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD dan Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyatakan bahwa kedua intansi rutin dan konsisten dalam melaksanakan koordinasi baik secara formal ataupun informal ditambah kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya terus terjadi setiap tahun yang menambah faktor keharusan koordinasi yang terjalin antara kedua instansi berjalan rutin dan konsiten setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil analisis data diatas, pada dimensi komunikasi yang terjalin antar implementor kebijakan sudah berjalan baik. Sedangkan kendala terdapat kejelasan perintah tugas yang sampai saat ini belum ada pada koordinasi kedua instansi sehingga implementasi yang terjalin hanya berbentuk kerja sama kedua instansi saja dan bukan melalui sinegritas berdasarkan surat perintahan ataupun surat kerja.

3.2. Sumber Daya

Penulis melakukan analisis mengenai ketersedian sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan smart city di Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan tiga faktor yang antara lain : Sumber daya Manusia/Staff, Fasilitas, dan Anggaran

Pada sumber daya Manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat dilihat pada **tabel 1**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	SD	-
2.	SMP	-
3.	SMA	25
4.	D-1	8
5.	D-2	-
6.	D-3	5
7.	D-4	-
8.	S-1	20
9.	S-2	3
10.	S-3	-
Jumlah		**61**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, 2021

Pada sumber daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup, dapat dilihat pada **tabel 2**

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	10
4	D-1	-
5	D-2	-
6	D-3	3
7	D-4	-
8	S-1	31
9	S-2	6
10	S-3	-
Jumlah		**50**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2021

Berdasarkan data diatas terdapat 61 tenaga kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan berbagai tingkat pendidikan. 25 dengan tingkat pendidikan SMA, 8 orang dengan tingkat pendidikan D-1, 5 orang dengan tingkat pendidikan D-3, 20 orang dengan tingkat pendidikan S-1 dan 3 orang dengan tingkat pendidikan S-2. Dari data tersebut diketahui bahwa terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia yang berkompetensi untuk mengsisi kekosongan jabatan sehingga BPBD terpaksa mengambil SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi di tugas pokok dan fungsinya. Selain itu hal ini juga terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki 50 tenaga kerja dimana menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya sangat kurang apalagi untuk urusan tugas di lapangan. Dari 50 tenaga kerja yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup teridir dari 10 orang

dengan tingkat pendidikan akhir SMA, 33 orang dengan tingkat pendidikan akhir D-3, 31 orang dengan tingkat pendidikan akhir S-1, dan 6 orang dengan tingkat pendidikan akhir S-2.

Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah **Tabel 3**

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Pusdalops	Unit	1
2	Mobil Rescue Dobel Kabin	Unit	1
3	Mobil Rescue Singel Kabin	Unit	1
4	Sepeda Motor Trail	Unit	2
5	Water Treatment Plant (WTP)	Unit	1
6	Pompa Apung	Unit	1
7	Genset	Unit	3
8	Tenda Posko	Unit	2
9	Tenda Pengungsi	Unit	7
10	Tenda Keluarga	Unit	10
11	Velbed Aluminium	Buah	25
12	Senter HID	Unit	2
13	Handy Talky	Unit	3
14	Radio SSB	Set	2
15	GPS	Set	1
16	Portable Water Pump	Unit	4
17	Selang Nozzie 1,5 Inch	Roll	17
18	Selang Nozzie 2 Inch	Roll	5
19	Selang Nozzi 2,5 Inch	Roll	10
20	Sepatu Bot	Buah	5
21	Baju Anti Api	Set	2

Sumber: BPBD Kota Palangka Raya Tahun 2021

Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2021 **Tabel 4**

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Gedung Kantor Permanen	Buah	2
2	Gudang Lab. Lingkungan	Unit	1
3	Tempat Parkir	Unit	1
4	Sepeda Motor	Unit	30
5	Mobil Minibus MP	Unit	4
6	Mobil Pick Up	Unit	5
7	Komputer	Unit	18
8	Printer	Unit	23
9	Telepon/fax	Unit	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 2021

Terkait faktor fasilitas dapat dilihat melalui tabel 3 dan 4 diatas baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya merasa perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dengan luasnya wilayah Kota Palangka Raya tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengoptimalan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilapangan. Melalui wawancara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup sendiri beliau menyatakan sangat membutuhkan pembaruan saran dan prasaran karena fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sangat kurang bahkan dalam setiap kerja sama yang dilakukan oleh kedua instansi ini lebih sering menggunakan sarana dan prasaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selain itu setiap tahunnya Dinas Lingkungan Hidup sering melaksanakan pinjam pakai sarana dan prasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan program kerjanya di lapangan.

Faktor anggaran terkait faktor anggaran ini sebab kedua instansi dalam menjalani koordinasi hanyalah melalui kerja sama maka untuk anggaran yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Menurut wawancara yang diilakukan bersama kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup anggaran yang diberikan kepada kedua instansi ini masih kekurangan dengan luasnya wilayah Kota Palangka Raya yang perlu diperhatikan setiap tahunnya.

3.3. Disposisi

Pada dimensi disposisi terdapat satu subfaktor yang dijadikan alat ukur pada keberhasilan sebuah implementasi, diantaranya ialah sikap dan perilaku pelaksana. Pada indikator sikap dan perilaku pelaksana peneliti menyimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup saling bekoordinasi dengan cara bekerja sama satu sama lain di lapangan dalam melaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya.

3.4. Struktur Birokrasi

Menurut pendapat Edward III, bahwa sebuah struktur birokrasi yang baik apablia pada pelaksanaannya memiliki Standar Operasional Prosedur sebagai acuan kerja serta terjalinnya sebuah

pembagian tugas dan wewenang antar dinas yang menunjukan bentuk koordinasi didalamnya. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa pada indikator Standar Operasional Prosedur (SOP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup tidak/belum mempunyai SOP bersama. SOP yang ada hanyalah SOP masing-masing intansi dalam pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan berjalan dengan baik meski belum optimal, disebabkan belum adanya kebijakan untuk mengeluarkan Surat Perintah untuk melaksanakan dan membuat program kerja dimana kedua instansi ini berkoordinasi dalam pencegahan sehingga terkesan kedua instansi ini ditambah dengan luasnya wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya. Selain itu masih tingginya tingkat Masyarakat Kota Palangka Raya yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran lahan cukup menyulitkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup.

Kebijakan Implementasi ini secara jangka panjang mampu dioptimalkan dan di dukung sehingga dpaat mengoptimalkan tingkat pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada fase cepat tanggap tetapi juga mulai dioptimalkan dari saat fase pencegahan.

a. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis juga menemukan bahwa koordinasi yang berjalan juga belum optimal disebabkan koordinasi yang berjalan membutuhkan Masyarakat sekitar daerah rawan bencana karena masyarakat merupakan orang-orang yang lebih memahami dan mengerti daerah sekitar agar pencegahan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih optimal.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya berjalan dengan baik meski belum optimal dengan beberapa indikator masih mengalami kekosongan yang mengganggu terhadap pelaksanaan implementasi Smart City.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik.* Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta

Dhafri, Aldi. 2021. Skripsi: Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Nurfatiehah, Sitie. 2019. Skripsi: Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah

Nurfatiehah, Sitie. 2019. Skripsi: Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah

Wibowo, Kunto Arief. 2019. Jurnal: Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Studi Sosial dan Politik. Vol(3): hal 69-83

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BHINNEKA TUNGGAL IKA
1956